

Analisis Implementasi SAK Nomor 101 pada Laporan Keuangan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen

Analysis of the Implementation of SAK Number 101 in Financial Reports at KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen

Yuliyanti M. Manan, Devi Sofiyatul Fatimah

ABSTRACT

This study aims to determine the understanding of the management of KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang about SAK number 101 in the presentation of Islamic financial statements and to determine the application of SAK No. 101 in the presentation of Islamic Financial Statements at KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang. The type of research used is qualitative research with descriptive analysis. Data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results showed that the board only understood the broad meaning of financial statements but did not understand the components contained in each item of financial statements by Sharia principles and SAK No. 101. As for applying SAK number 101 in the presentation of Islamic financial statements at KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang, it has implemented SAK No. 101 in the presentation of its financial statements.

Keywords: *financial reports, presentation of financial reports, SAK No. 101*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengurus KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang tentang SAK nomor 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah dan untuk mengetahui penerapan SAK No 101 pada penyajian Laporan Keuangan syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus hanya memahami arti luas dari laporan keuangan tetapi tidak begitu paham terkait komponen – komponen yang tertuang dalam setiap item laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan SAK No 101. Adapun pada penerapan SAK nomor 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang sudah menerapkan SAK No 101 pada penyajian laporan keuangannya.

Kata Kunci: laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, SAK No. 101



JIHBIZ

Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking

P-ISSN 1238-1235 | E-ISSN 2807-6028

Vol. 8 No. 2 2024

Page 115-126

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat,
Malang, East Java, Indonesia

Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i2.4761>

Author(s):

Yuliyanti M. Manan¹

Email: mananyuliyanti@gmail.com

Devi Sofiyatul Fatimah¹

Email: devisofiyatul@gmail.com

Affiliation:

¹ *Universitas Islam Raden Rahmat, Malang,
East Java, Indonesia*

Correspondence:

mananyuliyanti@gmail.com

Article Type: Research Paper

Submission's History:

Received	:	24 June 2024
Revised	:	11 July 2024
Accepted	:	23 July 2024

1. Pendahuluan

Pengenalan konsep ekonomi syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992, sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, berdirinya Bank Muamalat diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPR Syariah). Namun, keberadaan kedua jenis lembaga keuangan ini belum merambah lapisan masyarakat Islam yang lebih rendah. Oleh karena itu, salah satunya adalah lembaga simpan pinjam atau yang lebih dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau *Baitul Mall Wa Tamwil* (BMT) (Asmita, 2020).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah sangat penting bagi lembaga keuangan syariah karena membantu koperasi memastikan bahwa praktik keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan lainnya yang diperintahkan oleh Islam. Mengikuti PSAK Syariah dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi, terutama bagi mereka yang peduli akan aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Hayati, 2008). Oleh karena itu, PSAK Syariah memainkan peran penting dalam menjaga integritas, kepatuhan, reputasi, dan keberlanjutan koperasi dalam kerangka prinsip-prinsip syariah (Halim et al., 2022).

Sampai saat ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) telah mengesahkan 10 PSAK tentang pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk badan keuangan syariah yang memiliki manfaat sebagai tolok ukur dalam aturan-aturan pelaporan keuangan lembaga syariah yang berisi: PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah), PSAK 102 (Akuntansi Murabahah), PSAK 103 (Akuntansi Salam), PSAK 104 (tentang Akuntansi Istisna), PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah), PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah), PSAK 107 (Akuntansi Ijarah), PSAK 108 (Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah), PSAK 109 (Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah), dan PSAK 110 (Akuntansi Sukuk) (DSAK IAI, 2021: 5).

PSAK 101 pertama kali diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan syariah pada PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berdasarkan ketentuan surat Dewan pengurus Nasional (DPN) IAI No.0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI (Usman et al., 2020). Pada PSAK 101 posisi penyajian laporan keuangan terdiri dari 7 komponen laporan keuangan, meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Dana Zakat, Laporan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan, Catatan atas Laporan Keuangan (Amelia et al., 2021).

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) BMT UGT Nusantara Capem Kapanjen Malang merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah, sehingga dalam laporan keuangannya harus memenuhi standar dari PSAK yaitu memenuhi 7 item laporan keuangan, selain itu KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kapanjen Malang banyak diminati oleh pelaku usaha ekonomi mikro, karena beberapa pertimbangan seperti bagi hasil, jangka waktu, persyaratan dokumen dan reputasi perusahaan yang baik ditambah dengan banyaknya pilihan akad pada kegiatan simpanan, pembiayaan membuat para anggotanya menjadi leluasa untuk menentukan produk pembiayaan yang dapat menjadi penunjang dalam peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Pemahaman yang baik terhadap SAK Nomor 101 sangat penting bagi pengurus KSPPS BMT untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Begitu juga dengan penerapan SAK Nomor 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga menunjukkan komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara benar. Hal ini akan memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan dalam penyajian laporan keuangan syariah yang akuntabel dan transparan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah sangat penting bagi lembaga keuangan syariah karena membantu koperasi memastikan bahwa praktik keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan ketentuan lainnya yang diperintahkan oleh Islam. Mengikuti PSAK Syariah dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi, terutama bagi mereka yang peduli akan aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Hayati, 2008). Oleh karena itu, PSAK Syariah memainkan peran penting dalam menjaga integritas, kepatuhan, reputasi, dan keberlanjutan koperasi dalam kerangka prinsip-prinsip syariah (Halim et al., 2022).

PSAK-SYARIAH mulai disahkan di Indonesia pada tahun 2002 yang terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus untuk transaksi yang bernaungan syariah. Tujuan PSAK-SYARIAH adalah menyelenggarakan badan usaha maupun lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah Pada tanggal 1 Mei 2002 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2003 (Hiya et al., 2022).

2.2 Penyajian Laporan Keuangan Syariah Menurut SAK 101

PSAK 101 mendefinisikan entitas syariah sebagai entitas syariah yang menjalankan operasinya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam aturannya. PSAK 101 membahas penyajian laporan keuangan syariah yang ditujukan bagi badan usaha syariah yang dalam pengoperasiannya mengacu pada prinsip syariah dengan berbagai bentuk badan hukum, seperti koperasi, yang memerlukan standar pelaporan terhadap penyajian laporan keuangannya (Ilyas, 2016).

Pada PSAK 101 posisi penyajian laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen laporan keuangan, meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Dana Zakat, Laporan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan, Catatan atas laporan Keuangan (Amelia et al., 2021).

2.2.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Neraca menyajikan akun-akun riil seperti Aktiva (harta), Kewajiban (Hutang), Ekuitas (modal) dan Dana Syirkah Temporer. Dalam Laporan Posisi Keuangan dapat diketahui berapa

jumlah kekayaan suatu lembaga, kemampuan lembaga dalam memperoleh pinjaman dari bank lain. Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang jumlah utang entitas kepada kreditor dan jumlah investasi pemilik yang ada di dalam lembaga tersebut (Farha et al., 2022).

2.2.2 Laporan Laba/Rugi

Laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas lembaga keuangan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode tertentu, baik dalam satu bulan atau satu tahun. laporan Laba/Rugi mencantumkan akun nominal (akun pendapatan dan akun beban). Laporan laba rugi harus dibuat dalam siklus akuntansi dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui berapa banyak pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah dipakai (Saputra, 2022). Dari penjumlahan akhir antara total pendapatan dan total Beban. Akan menghasilkan Jumlah pendapatan dan beban dikurangi, selisihnya disebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, itu disebut laba (Untung), tetapi jika sebaliknya, jika pendapatan lebih rendah dari jumlah biaya, perusahaan dianggap rugi.

2.2.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan (Rahmadieni, 2019).

2.2.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluarnya uang dalam suatu perusahaan. Laporan ini menggambarkan transaksi kas dan bank selama periode waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan. Di dalam laporan Arus kas tersusun dari sumber dan penggunaan kas dari atau untuk kegiatan operasional, Sumber dan penggunaan kas dari atau aktivitas investasi, dan Sumber dan penggunaan kas dari atau untuk kegiatan pendanaan (Putriani et al., 2022).

2.2.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat untuk diserahkan kepada penerima zakat. Pembayaran zakat dilakukan jika harta sudah memenuhi kriteria wajib zakat. Lembaga syariah harus menyajikan laporan keuangan yang berisi sumber dan penggunaan dana zakat (Kholifah, 2017).

2.2.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan merupakan laporan yang berisi informasi penerimaan dan penggunaan dana kebajikan yang diterima oleh lembaga syariah (Harkaneri & Reflisa, 2018).

2.2.7 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan keuangan dan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tambahan mengenai estimasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Utami & Prasetyo, 2022).

2.3 Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS)

Koperasi syariah secara teknis dapat diartikan sebagai koperasi yang kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan Assunah (Johan, 2020). Secara umum, koperasi syariah adalah suatu badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

KSPPS BMT UGT Unit Sidogiri Kepanjen, dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penghimpun dana (*funding*) dan penyalur dana (*lending*), menyediakan produk keuangan berbasis syariah berupa produk tabungan (simpanan) dan produk pinjaman (pembiayaan). Produk simpanan adalah dana yang dititipkan kepada BMT dengan pembagian nisbah sesuai dengan jenis simpanan. Produk pembiayaan digunakan untuk baik itu produktif maupun konsumtif (Marlina & Pratama, 2017).

3. Metodologi

3.1 Konteks Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian ini adalah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen di Jl. Teuku Umar No.51 A, Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan dan wawancara secara langsung kepada pihak Koperasi simpan pinjam syariah BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang dan data sekunder berupa dokumentasi laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya yang ada di Koperasi simpan pinjam syariah BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang, serta literatur lain seperti jurnal penelitian, buku, artikel dan lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Observasi

Dalam kegiatan observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan penerapan SAK 101 pada laporan keuangan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen.

3.2.2 Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertama kali digunakan untuk memperoleh

informasi yang diperlukan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang ingin diajukan.

3.2.3 Dokumentasi

Data laporan keuangan Koperasi simpan pinjam syariah BMT UGT Nusantara Capem Kapanjen Malang, serta dokumen terkait penelitian ini seperti struktur organisasi, sejarah, visi misi dan lain sebagainya.

3.3 Metode Analisis Data

Model teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu model Miles dan Huberman dimana aktivitas dalam analisis data metode kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara menyeluruh dan terus menerus sampai data yang diperoleh tuntas (Sugiyono, 2017: 132).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Profil KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kapanjen Malang

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang Menyebarkan di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan *Baitul Maal wat Tamwil*/Jasa Keuangan Syariah.

4.2 Analisis Pemahaman Pengurus tentang SAK No. 101 pada Laporan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kapanjen Malang bahwasanya pengurus yang telah diwawancarai oleh peneliti sudah memahami arti luas dari laporan keuangan, tujuan dan manfaat laporan keuangan bagi suatu badan atau lembaga keuangan. Namun Pengurus kurang memahami terkait komponen – komponen dari laporan keuangan, mereka hanya memahami isi laporan keuangan secara umum seperti Neraca, laporan laba atau rugi dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan menurut SAK No. 101 bukan hanya arti luas yang harus dipahami setiap pengurus di dalam koperasi, namun harus ada komponen laporan keuangan yang lengkap. Menurut SAK No. 101, Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen berikut laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana

zakat, laporan tentang sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang dalam menentukan kesesuaian laporan keuangan terdapat beberapa langkah yang biasanya diambil oleh pengurus koperasi seperti memahami secara menyeluruh ketentuan yang terdapat dalam SAK No. 101 untuk penyajian laporan keuangan, menyesuaikan sistem akuntansi mereka agar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SAK No. 101, memilih metode akuntansi yang sesuai dengan SAK No. 101 untuk setiap transaksi yang terjadi dalam koperasi, memisahkan transaksi keuangan koperasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SAK No. 101 untuk memastikan transparansi dan keakuratan laporan keuangan dan memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah diungkapkan sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam SAK No. 101.

Dalam menerapkan SAK No. 101 tentang laporan keuangan dalam meningkatkan kinerja di koperasi, para pengurus melakukan efektivitas seperti pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana efektivitas penerapan SAK No. 101 membawa dampak positif bagi koperasi seperti halnya penerapan SAK No. 101 memberikan transparansi dan kepastian hukum dalam penyajian laporan keuangan koperasi, juga membantu meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait seperti anggota koperasi, pemberi pinjaman, Investor, dan regulator. Laporan keuangan yang mematuhi SAK No. 101 dapat meningkatkan akses koperasi ke sumber dana eksternal seperti pinjaman bank atau investasi modal ventura karena meningkatkan kepercayaan para pemberi pinjaman atau investor terhadap kelayakan dan transparansi koperasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang diakui secara internasional, seperti SAK No. 101 dapat meningkatkan reputasi koperasi di mata publik, anggota, dan pihak lainnya, sehingga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dan memperkuat citra koperasi di lingkungan masyarakat.

Selain itu, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang juga melakukan evaluasi atau peninjauan berkala terhadap kualitas laporan keuangan syariah yang disajikan. Sebagai suatu badan atau lembaga yang mengampu tentang keuangan, maka perlu dilakukan evaluasi atau peninjauan berkala terhadap kualitas laporan keuangan syariah yang disajikan. Evaluasi berkala terhadap laporan keuangan syariah melibatkan beberapa langkah, seperti memeriksa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, validitas transaksi syariah, penggunaan dana secara halal, dan konsistensi dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Hal ini melibatkan tinjauan terhadap proses akuntansi, pengawasan internal, dan audit eksternal oleh lembaga yang memiliki keahlian dalam keuangan syariah. Setelah melakukan evaluasi, tentunya KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen melakukan perbaikan untuk koperasi dalam meningkatkan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah meliputi:

- a. Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan kepada staf terkait prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi dan keuangan Islam.
- b. Pengembangan Kebijakan: Membangun kebijakan dan prosedur yang jelas tentang bagaimana mengelola dana dengan mematuhi prinsip syariah.
- c. Konsultasi Ahli: Mendapatkan konsultasi dari ahli syariah atau akuntan yang memahami prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan.
- d. Audit Internal: Melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan bahwa operasi koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Pemilihan Investasi: Memilih investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba dan investasi yang melanggar hukum Islam lainnya.

- f. Transparansi: Memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan untuk memberikan keyakinan kepada anggota koperasi bahwa dana mereka dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Edukasi Anggota: Memberikan edukasi kepada anggota tentang pentingnya kesesuaian dengan prinsip syariah dalam kegiatan keuangan koperasi.

4.3 Analisis penerapan SAK No. 101 dalam Penyajian Laporan Keuangan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen

Pelaporan akuntansi, lembaga keuangan harus mematuhi peraturan PSAK, standar akuntansi keuangan dalam pekerjaan akuntansi di mana topik tersebut dibahas mencakup hampir setiap aspek akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan kelompok individu yang memiliki kemampuan untuk bidang akuntansi yang bergabung dalam ikatan Akuntansi Internasional (IAI).

Penerapan SAK No. 101 dalam penyajian laporan keuangan dapat dilihat dengan adanya beberapa komponen dalam laporan keuangan koperasi. Menurut SAK No. 101, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen berikut seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan tentang sumber dan penggunaan dana zakat, laporan tentang sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Neraca menyajikan akun-akun riil seperti Aktiva (harta), Kewajiban (hutang), Ekuitas (modal) dan Dana Syirkah Temporer. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada data yang ada dan hasil wawancara, bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen sudah menyusun laporan neraca. Bentuk neracanya sudah sesuai dengan SAK syariah No. 101. Namun ada 1 pos yaitu deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* yang ada di dalam laporan neraca dari KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen belum digolongkan sebagai dana *syirkah* temporer. Padahal jika melihat kembali ke dalam penjelasan yang terkait dengan deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* dalam SAK 101, masuk ke dalam penggolongan dana *syirkah* temporer.

Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas lembaga keuangan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode tertentu, baik dalam satu bulan atau satu tahun. Laporan Laba/Rugi mencantumkan akun nominal (akun pendapatan dan akun beban). Laporan laba rugi harus dibuat dalam siklus akuntansi dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui berapa banyak pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah dipakai.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, di dalam Laporan Laba/Rugi dari KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen, pertama KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen sudah menyusun laporan laba rugi. Kedua, bentuk Laporan Laba Rugi pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen sudah sesuai dengan SAK 101. Ketiga, Laporan Laba Rugi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen sudah mengungkapkan unsur pendapatan dan beban usaha serta sudah menggolongkan beban dan pendapatan tersebut ke dalam beban dan pendapatan operasional maupun non operasional. Dari ketiga poin tersebut, Laporan Laba Rugi yang dibuat

oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam SAK 101.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan apakah modal suatu perusahaan meningkat atau menurun sebagai akibat dari keuntungan atau kerugian yang diterima perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dari KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen, sudah menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan SAK 101.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluarnya uang dalam suatu perusahaan. Arus kas masuk adalah pendapatan atau pinjaman dari pihak lain. Sedangkan, Arus kas keluar merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan ini menggambarkan transaksi kas dan bank selama periode waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bahwa di dalam Laporan Arus Kas dari KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen, sudah sesuai dengan SAK 101 dikarenakan sudah menyusun laporan arus kas sesuai dengan SAK 101 dan isi laporannya sudah dipilah-pilah menjadi tiga golongan yaitu arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang di dalam SAK 101. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen sudah menyusun laporan arus kas dengan baik dan sesuai dengan SAK 101.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat untuk diserahkan kepada penerima zakat. Pembayaran zakat dilakukan jika harta sudah memenuhi kriteria wajib zakat. Lembaga syariah harus menyajikan laporan keuangan yang berisi sumber dan penggunaan dana zakat.

Berdasarkan hasil analisis, bahwa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen terdapat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sesuai dengan SAK No. 101 yang dibuatkan oleh LAZ Sidogiri, dikarenakan pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat di serahkan kepada LAZ Sidogiri lembaga yang berada di bawah naungan KSPPS UGT Nusantara pusat yang khusus mengelola dana zakat. Sumber dana zakatnya berasal dari kekayaan kantor cabang yang dalam perhitungannya dilakukan oleh LAZ Sidogiri lewat SHU, dan untuk dana zakatnya disalurkan kepada pihak-pihak penerima zakat, melalui LAZ Sidogiri.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebijakan merupakan laporan yang berisi informasi penerimaan dan penggunaan dana kebajikan yang diterima oleh lembaga syariah. Lembaga keuangan syariah harus menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen sudah membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sesuai dengan SAK No. 101. Yang dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sudah memuat tentang akun-akun sumber dana kebijakan seperti Infak, Sedekah, Hasil pengelolaan wakaf. Juga sudah memuat tentang akun-akun penyaluran sumber dana kebajikan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan keuangan dan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tambahan mengenai estimasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi-informasi

yang tidak terdapat dalam laporan keuangan bagian mana pun. Catatan ini bersifat menjelaskan akun-akun dalam laporan keuangan yang belum disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen mendeskripsikan Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Sifat dari informasi dalam catatan atas laporan keuangan adalah mendukung informasi di dalam laporan keuangan.

5. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pemahaman pengurus tentang SAK No. 101 pada laporan keuangan terdapat beberapa pengurus yang hanya memahami arti luas dari laporan keuangan tetapi tidak begitu paham terkait komponen-komponen yang tertuang dalam setiap item laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan SAK No. 101 pada penyajian laporan keuangan. Sedangkan pada penerapan SAK nomor 101 dalam penyajian laporan keuangan syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang sudah menerapkan SAK No. 101 pada penyajian laporan keuangan, namun, pada Laporan Posisi Keuangan atau Neraca pada akun deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* belum digolongkan sebagai dana syirkah temporer. Padahal dalam penjelasan yang terkait dengan deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* dalam SAK 101, masuk ke dalam penggolongan dana *syirkah* temporer.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah :

1. Mengingat pentingnya laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal , maka sebaiknya dalam komponen-komponen yang tertuang dalam setiap item laporan keuangan disesuaikan dengan SAK No. 101 tidak menggunakan istilah lama.
2. Merekrut atau menambah SDM yang kompeten di bidang akuntansi, khususnya memiliki pemahaman terkait penyajian laporan keuangan menurut SAK No. 101.
3. Memaksimalkan sosialisasi, khususnya sosialisasi terkait standar dan penyajian laporan keuangan kepada pengurus KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kepanjen Malang.
4. Memperketat pengawasan dan pemeriksaan baik segi operasional hingga penyajian laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Amelia, F., Rahmad, M., & Putra, M. D. (2021). ANALISIS PENYAJIAN PSAK 101 PADA LAPORAN KEUANGAN PT. BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSYA)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2696>
- Farha, F., Hermanto, A., Saniyah, E. Y., Indranopa, R., & Kalbuadi, A. (2022). Logika Akuntansi dalam Menyusun Jurnal Umum. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 62–67. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v1i2.8>
- Halim, S., Suparno, S., & Rahardja, P. (2022). Membangun Bisnis secara Digital Berbasis Akad Syariah untuk Pelaku UMKM di Kota Tangerang. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v3i1.679>
- Harkaneri, H., & Reflisa, H. (2018). Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 102–110. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3394](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3394)
- Hayati, E. L. (2008). Pemahaman Praktisi BMT di Yogyakarta Terhadap PSAK No. 59 (Akuntansi Perbankan Syariah) Pengakuan dan Pengukuran Produk Funding. *Millah*, 8(1), 33–48. <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art3>
- Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No.102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 70–73. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1298>
- Ilyas, R. (2016). KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH. *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 1(1), 19–41. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.603>
- Johan, I. (2020). Peranan koperasi Syariah dalam meminimalisir ketergantungan masyarakat berhubungan dengan rentenir. *Journal of Enterprise and Development*, 2(1), 22–34. <https://doi.org/10.20414/jed.v2i01.1885>
- Kholifah, A. (2017). PENYAJIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA GRESIK BERDASARKAN PSAK No. 101. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 1(1), 47–68. <https://doi.org/10.29080/jai.v1i1.6>
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). KOPERASI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PENERAPAN AKAD SYRIKAH YANG SAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Putriani, A., Damanik, E. O. P., & Purba, J. W. P. (2022). Analisis Laporan Arus Kas untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 185–196. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1.2021>
- Rahmadieni, R. Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri. *Al-Mashrafyah: Jurnal*

Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah, 3(2), 128. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10038>

Saputra, D. (2022). ANALYSIS OF ACCOUNTING IMPLEMENTATION OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUMDes) KUANTAN SINGINGI REGENCY. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i1.1749>

Usman, A. F., Mursalim, M., & Su'un, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Terpilih Di Indonesia Pasca Spin Off. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 1(1), 130–143. <https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.143>

Utami, L. A., & Prasetyo, R. D. (2022). SISTEM INFORMASI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL BERBASIS WEB. *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 7(2), 90. <https://doi.org/10.36549/ijis.v7i2.197>